

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang masih perlu untuk terus berusaha mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakatnya. Agar usaha tersebut dapat tercapai diperlukan metode yang tepat dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Salah satu pihak yang dapat dijadikan partner untuk bekerja sama adalah lembaga keuangan, karena lembaga keuangan memerankan peran yang cukup besar yaitu sebagai penjaga kestabilan perekonomian negara. Lembaga keuangan meliputi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan dalam kegiatan usahanya bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik masyarakat kelas atas maupun kelas menengah ke bawah. Hal tersebut memungkinkan lembaga keuangan sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan.

Survei Bank Dunia pada tahun 2010 menunjukkan hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Hal serupa ditemukan Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga tahun 2011 yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48%. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu 52%. Kedua survei tersebut saling menguatkan dan

mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan non formal masih relatif rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan. Rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal mereka.¹

Namun demikian dengan segala permasalahan tersebut di atas, di antara negara berkembang lainnya, akses masyarakat kepada layanan keuangan di Indonesia tergolong moderat. Tingkat akses penduduk Indonesia pada layanan keuangan lebih besar dari dua *emerging giants* India dan Cina, dan hanya sedikit di bawah Thailand, Malaysia, bahkan Korea Selatan. Artinya, masih ada ruang untuk membuat sistem keuangan lebih inklusif dan meraih keuntungan sosial yang lebih besar. Akses terhadap layanan jasa keuangan tersebut merupakan permasalahan kompleks yang menyangkut sisi masyarakat sebagai konsumen dan sisi lembaga keuangan sebagai produsen. Hal ini memerlukan perumusan pendekatan multi dimensional dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan. Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk menerapkan strategi keuangan inklusif untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.²

Keuangan inklusif adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap

¹Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, Booklet Keuangan Inklusif Tahun 2014, hlm. 4

² *Ibid.*, hlm 5

akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif telah masuk dalam prioritas pemerintah Indonesia. Pada bulan Juni 2012, Bank Indonesia berkerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden-Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), strategi keuangan inklusif dijabarkan dalam 6 pilar yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen. Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.³

Bank Indonesia menetapkan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) sebagai salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan.⁴

³ *Ibid.*, hlm 5

⁴ Ita Hartati dan Azwar, *Seberapa Penting Inklusi Keuangan Syariah Bagi Indonesia*, Artikel Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan,

Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dll.). Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: (1) jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa; (2) jumlah ATM per 10.000 penduduk dewasa; (3) jumlah kantor bank per 1.000 km²; dan (4) jumlah ATM per 1.000 km². Dimensi Penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: (1) jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari deposito, giro dan tabungan per 1.000 penduduk dewasa; dan (2) jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa. Sedangkan Dimensi Kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengukuran terhadap dimensi ini masih sukar untuk dilakukan dan saat ini beberapa lembaga internasional yang *concern* dalam pengembangan keuangan inklusif sedang menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta *tools* yang dipergunakan. Secara umum The Alliance for Financial Inclusion (AFI) telah menyepakati prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam menyusun indikator dari dimensi kualitas, meliputi ringkas (*conciseness*), spesifik (*specifity*),

sederhana (*simplicity*), adanya perbaikan (*improvement*), dan *client perspective*.⁵

Untuk mewujudkan program keuangan inklusif yang berkesinambungan diperlukan koordinasi antara Bank Indonesia dengan kementerian dan institusi terkait dalam rangka pengembangan, penetapan prioritas dan pelaksanaan program, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. Dengan koordinasi yang baik diharapkan tujuan peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan dapat tercapai. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, perbankan berperan besar untuk menjadi motor penggerak kegiatan keuangan inklusif mengingat perbankan Indonesia memiliki *share* kegiatan keuangan sampai dengan 80%. Namun demikian keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, tetapi juga pemerintah dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas.⁶

Perbankan syariah juga merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. Sektor perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang diharapkan mampu menjadi alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Jumlah Bank Syariah saat ini semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk non-bunga.⁷ Berikut adalah tabel perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia:

⁵ *Ibid.*

⁶ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, Booklet Keuangan Inklusif Tahun 2014, hlm. 6

⁷ Novia Nengsih, *Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*, Jurnal Etikonomi Vol. 14, No. 2 Oktober 2015, hlm. 6

Tabel 1. 1
Perkembangan Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Bank
1.	2014	197
2.	2015	197
3.	2016	200
4.	2017	201
5.	2018	201

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, data diolah 2019

Jumlah bank syariah yang semakin bertambah dari tahun ke tahun berdasarkan tabel di atas membuktikan bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan tumbuh meskipun terbiang lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Perkembangan secara kuantitas ini sudah tersebar dari pusat hingga ke daerah sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu bagian penting dari lembaga keuangan formal di negeri ini diharapkan mampu mengimplementasikan keuangan inklusif dengan lebih efektif.⁸

Di Indonesia baru diperkenalkan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) sejak tahun 1992 lalu sistem perbankan ganda yaitu suatu sistem ketika bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan.⁹ Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam

⁸ *Ibid.*,

⁹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm v.

antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.¹⁰ Lembaga keuangan syariah dibentuk sebagai perwujudan dari adanya kesadaran masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, yakni sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam.¹¹

Dalam implementasi keuangan inklusif, lembaga keuangan tidak bisa dilihat secara sempit hanya dengan memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dan bertambahnya minat masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank, tetapi juga harus lebih didorong pada pemberian fasilitas kredit baik bagi individu maupun untuk kalangan UMKM. Hal ini sesuai dengan pilar kedua keuangan inklusif, yakni fasilitas keuangan publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹² Menurut Shankar (2013) pentingnya inklusi keuangan berasal dari berbagai faktor

¹⁰ *Ibid.*, hlm 1

¹¹ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 14

¹² Rotua Nuraini Tampubolon, dkk, *Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus Penyaluran Kredit Usaha Mikro Melalui Program Kemitraan Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem oleh Bank BNI 46)*, Koalisi Responsi Bank Indonesia dibuat pada tahun 2017, hlm.

salah satunya kurangnya akses menuju tabungan yang aman dan formal dapat mengurangi dorongan mereka untuk menyimpan. Ketika menabung, manfaat keamanan dan tingkat suku bunga mungkin tidak sejauh yang tersedia dalam sistem formal. Pada saat dibutuhkan, tabungan yang tidak memadai akan mengarahkan rumah tangga pada kebergantungan pada sumber-sumber dana eksternal. Sering kali sumber tersebut menerapkan tingkat bunga yang tinggi. Suku bunga tinggi akan meningkatkan kenaikan risiko peminjam sulit untuk melunasi hutang.¹³ Disini peran perbankan syariah penting untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana melalui pemberian pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang lebih ringan dan halal. Sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah berbeda dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional yang mana pada bank syariah berprinsip untuk tidak menerapkan praktik riba. Besarnya rasio bagi hasil bank syariah didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, sedangkan bungan besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.¹⁴ Dengan demikian pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan biaya jasa yang murah dan aman.

Selain pembiayaan, perbankan syariah juga perlu memperhatikan soal pemasaran. Pemasaran memiliki peran penting dalam pencapaian keberhasilan sebuah perusahaan barang maupun jasa termasuk perbankan syariah. Dalam dunia pemasaran biasanya selalu dikaitkan dengan bauran

¹³ Setyani Irmawati, dkk, *Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan*, *Journal of Economics and Policy*, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 154-155

¹⁴ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, ..., hlm. 6

pemasaran (*marketing mix*). Bauran pemasaran meliputi *place*, *product*, *price*, dan *promotion*. Salah satu strategi yang mungkin untuk dilakukan yaitu promosi.

Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Sedangkan tujuan promosi adalah memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen.¹⁵ Promosi adalah bagian dari bauran pemasaran yang besar peranannya, dan merupakan kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan perusahaan untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan.¹⁶ Dalam rangka memasarkan produknya bank syariah perlu menetapkan berapa biaya yang diperlukan untuk menjalankan strategi yang tepat untuk promosi, sehingga biaya tersebut dapat terdistribusikan dengan efisien dan menghasilkan kegiatan promosi yang efektif.

Kajian tentang pengurangan kemiskinan dari Bank Dunia merekomendasikan beberapa tindakan yang harus diprioritaskan salah satunya memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan.¹⁷ Dalam pencapaian keuangan inklusif perbankan syariah perlu memberikan jangkauan akses layanan yang mudah bagi masyarakat Indonesia diantaranya melalui peningkatan jumlah kantor. Jumlah kantor berkaitan dengan kemudahan masyarakat untuk mencapai bank syariah. Dengan bertambahnya

¹⁵ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 179

¹⁶ M. Fuad Christine dan Nurlela Sugiarto Paulus, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 130

¹⁷ Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 194-195

jumlah kantor perbankan syariah di berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan layanan bank syariah.

Dengan penerapan kebijakan keuangan inklusif ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah dalam pembiayaan di Bank Syariah yang merupakan salah satu indikator dalam tercapainya keuangan inklusif di Indonesia. Dalam indikator tersebut dicantumkan frekuensi penggunaan nasabah pembiayaan, karena sesuai dengan tujuan dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan dengan pemberian pembiayaan untuk melakukan usaha. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan, Promosi Dan Jumlah Kantor Terhadap Jumlah Nasabah Pembiayaan (Studi Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai implementasi keuangan inklusif oleh perbankan syariah timbul beberapa masalah seperti berikut:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang keberadaan perbankan syariah masih rendah.
2. Letak geografis kantor perbankan syariah yang belum merata dan masih terletak di pusat kota.

3. Fasilitas layanan transaksi secara elektronik masih minim, terutama mesin ATM yang masih terbatas jumlahnya.
4. Sistem bunga pada bank atau lembaga keuangan konvensional bersifat mengikat dan memberatkan nasabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan pada perbankan syariah berpengaruh terhadap jumlah nasabah pembiayaan sebagai indikator implementasi keuangan inklusif perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah promosi pada perbankan syariah berpengaruh terhadap jumlah nasabah pembiayaan sebagai indikator implementasi keuangan inklusif perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah jumlah kantor pada perbankan syariah berpengaruh terhadap jumlah nasabah pembiayaan sebagai indikator implementasi keuangan inklusif perbankan syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara pembiayaan perbankan syariah terhadap jumlah nasabah pembiayaan sebagai indikator implementasi keuangan inklusif perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara promosi perbankan syariah terhadap jumlah nasabah pembiayaan sebagai indikator implementasi keuangan inklusif perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara jumlah kantor perbankan syariah terhadap jumlah nasabah pembiayaan sebagai indikator implementasi keuangan inklusif perbankan syariah di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan keilmuan mengenai keuangan inklusi pada perbankan syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi terhadap pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan keuangan inklusi di Indonesia.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan literatur kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian yang akan datang untuk menambah sumber referensi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti yang sedang mengembangkan penelitiannya.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, agar tidak menyimpang dari tujuan yang penulis kehendaki dan bisa dilakukan secara mendalam. Maka ruang lingkup penelitian ini adalah:

- a. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari (X_1) pembiayaan, (X_2) promosi dan (X_3) jumlah kantor. Sedangkan variabel terikat untuk penelitian ini adalah (Y) jumlah nasabah pembiayaan.
- b. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia, sedangkan sampel penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Batasan Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti melakukan pembatasan masalah dengan tujuan dalam pembahasan selanjutnya tidak mengalami perluasan. Adapun batasan masalah tersebut di antaranya:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tidak termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b. Adapun masalah yang diteliti adalah masalah yang menyangkut peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia melalui pembiayaan, promosi dan jumlah kantor dengan mengetahui pengaruhnya terhadap jumlah nasabah pembiayaan sebagai indikator keuangan inklusif perbankan syariah di Indonesia.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Keuangan inklusif didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya.¹⁸
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

¹⁸ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, Booklet Keuangan Inklusif Tahun 2014, hlm. 6

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

- c. Promosi adalah kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh perusahaan (penjual) untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan.²⁰
- d. Kantor adalah balai (gedung, rumah, ruang) tempat tulis-menulis atau mengurus suatu pekerjaan.²¹
- e. Nasabah merupakan pihak-pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.²²

2. Penegasan Operasional

- a. Keuangan inklusif adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.²³
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam hal ini adalah transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk

¹⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm 2,

²⁰ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 222

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008), hlm. 634

²² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema InsaniPress, 2001), hlm. 125

²³ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif Tahun 2014*, hlm. 4

- piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- c. Promosi dalam hal ini adalah biaya promosi yang dikeluarkan bank syariah untuk menunjang kegiatan pemasaran supaya dapat meningkatkan jumlah nasabah.
 - d. Jumlah kantor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total kantor gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang di dalamnya termasuk kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
 - e. Jumlah nasabah dalam penelitian ini yaitu jumlah keseluruhan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi yang dibahas pada setiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini disajikan unsur-unsur yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasar Teori, dalam bab ini diuraikan beberapa konsep dan anggapan tentang teori dari variable-variabel penelitian yang diteliti, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini berisi tentang rancangan penelitian yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sampel penelitian; sumber data dan variabel penelitian; teknik pengumpulan data; serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat deskripsi singkat mengenai hasil penelitian yang terdiri dari: hasil penelitian berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V Pembahasan, pada bab ini dibahas mengenai temuan-temuan penelitian yang telah dibahas pada hasil penelitian.

BAB VI Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan dan juga berisi saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.